

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 22 Januari 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas evaluasi seleksi CPNS 2018
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. Mardani, M.Eng/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara agenda membahas evaluasi seleksi CPNS 2018, pada hari Selasa, 22 Januari 2019, dibuka pada pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H Dr. H. Mardani, M.Eng dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara atas terselenggarakannya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera mengisi 59.458 formasi

yang belum terisi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

3. Komisi II DPR RI Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sepakat memberikan afirmasi kebijakan bagi peserta CPNS 2018 P1 yang lulus berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 tahun 2018 sebanyak 3% dapat menjadi CPNS. Untuk selanjutnya akan dibicarakan dan dicarikan formulasi yang tepat.
4. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara untuk segera melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di 48 instansi daerah yang tertunda pelaksanaannya agar formasi CPNS di daerah tersebut dapat terpenuhi.
5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan afirmasi dalam sistem pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2019 bagi tenaga honorer kategori II agar dapat mengikuti seleksi dan menjadi CPNS dan PPPK.
6. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan penjelasan tertulis terkait rencana seleksi CPNS dan PPPK 2019 setelah ada kepastian dari pemerintah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

**Jakarta, 22 Januari 2019**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**DR. H. MARDANI, M.Eng**  
**A-104**